



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERSPEKTIF KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Adib Hermawan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
adib.hermawan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah adalah inisiatif global yang telah diimplementasikan di 118 negara, dengan 53 negara menyediakan makanan bergizi secara gratis. Program terbukti meningkatkan kesehatan, prestasi akademik, partisipasi sekolah, serta status gizi anak, dan menciptakan lapangan kerja sambil menurunkan angka putus sekolah. Di Indonesia, perhatian terhadap MBG meningkat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama terkait dengan anggaran dan kebijakan.

Anak-anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan gizi seperti *wasting* (2,4%), *underweight* (6,8%), *overweight* (10,8%), obesitas (9,2%), dan anemia (26,8%) yang berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, serta perkembangan fisik dan kognitif anak. Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak dengan menyediakan makanan bergizi, yang memungkinkan siswa lebih fokus, belajar lebih efektif, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi akademik anak.

Penyediaan MBG memerlukan komitmen anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengalokasikan Rp71 triliun untuk program dari total anggaran pendidikan Rp722,6 triliun. Namun, tantangan dalam hal keberlanjutan dan efisiensi pendanaan masih ada, yang memerlukan dukungan dari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta. Meskipun ada pandangan bahwa anggaran MBG sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kebijakan tetap mendapatkan dukungan melalui RAPBN 2025 dan komitmen pemerintah yang menegaskan pentingnya program untuk masa depan bangsa.

Dari perspektif kebijakan, program MBG membutuhkan dukungan legislatif dan regulasi yang kuat melalui undang-undang. Di beberapa negara, penyediaan makanan bergizi di sekolah telah diatur melalui undang-undang. Misalnya, di Amerika Serikat terdapat National School Lunch Act 1946, di Jepang ada Shokuiku Kihon Hō 1954, di Finlandia Perusopetuslaki 1998, di Brasil Lei No. 11,947/2009, di Swedia Skollagen 2010, di India National Food Security Act 2013, dan di Inggris ada Children and Families Act 2014. Hal ini menunjukkan pentingnya kerangka regulasi untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan serta integrasi program ke dalam kurikulum pendidikan.

Program MBG di Indonesia telah mendapatkan perhatian dalam kebijakan jangka panjang negara, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang mengarah pada visi Indonesia Emas 2045. Program mendukung visi tersebut dengan memperbaiki gizi anak dan berkontribusi pada transformasi sosial yang inklusif dan adil, serta peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Pemerintah juga telah mengundang Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program, meskipun undang-undang khusus mengenai MBG belum ada.

Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan anak, sektor pertanian, dan ekonomi lokal, serta meningkatkan prestasi akademik dan kehadiran siswa di sekolah. Namun, implementasi program menghadapi berbagai tantangan, termasuk keberlanjutan anggaran, regulasi, sinergi pemangku kepentingan, risiko pengalihan dana, serta pemenuhan standar gizi dan keamanan makanan. Untuk keberhasilan program, Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, memperkuat pendanaan dan regulasi, serta memastikan koordinasi antar-lembaga yang efektif.

Penguatan regulasi dan pendanaan yang stabil sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program MBG. Dengan dukungan legislatif yang kuat, program dapat diimplementasikan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pada akhirnya, MBG diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan dukungan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI berperan penting dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan visi Indonesia Emas 2045. Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. mendorong pembentukan undang-undang mengenai MBG dalam Prolegnas 2024–2029 dan menjadikannya RUU prioritas;
2. mendorong pemerintah membuat regulasi sementara sebagai dasar legalitas MBG hingga undang-undang terbentuk; mengawasi siklus anggaran pendidikan dari APBN, memastikan anggaran
3. memadai, tidak dialihkan, dan dikelola dengan prinsip *good governance*, termasuk MBG;
4. menekankan pentingnya sumber pendanaan alternatif, seperti *public privat partnership* atau *corporate social responsibility*;
5. memastikan MBG berjalan optimal dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan penyesuaian teknis, kelembagaan, dan tata kelola yang akuntabel;
6. memperkuat pengawasan dengan fokus pengelolaan risiko, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas program MBG; dan
7. mengevaluasi MBG dan mendorong sinergi antar-pentahelix untuk kelancaran program berjalan dan mengatasi tantangan.

Sumber

detik.com, 16 Agustus 2024;
indonesia2045.go.id, 2024;
infobanknews, 16 Agustus 2024;
investor.id, 16 Agustus 2024;
kemenkes.go.id, 2018;
kontan.co.id, 18 Agustus 2024;

medcom.id, 17 Agustus 2024;
rm.id, 17 Agustus 2024;
rmol.id, 16 Agustus 2024;
setkab.do.id, 16 Agustus 2024;
sindonews.com, 17 Agustus 2024; dan
tempo.co, 7 & 16 Agustus 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdu Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.